

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah.Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.: CV. Alfabeta.Bandung.
- Anderson, J.E. (1979). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Editor:., Solahuddin Kusumanegara.: Penerbit Gava Media. Hal. 97-119.Yogyakarta.
- Atmosoeprapto, Kisdarto, 2002. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Denhardt,B.Robert,dkk, 2013, *PelayananPublikBaru :Dari Management Steering ke Serving*, KreasiKencana, Bantul, Yogyakarta.
- Djojosoekarto.,Agung, 2004. *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional Adeksi, Jakarta
- Dun, N William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. (Terjemahan: Samodra Wibawa): Gaja Mada University Pres.Yogyakarta.
- Duncan, Jack W. 1985, *Organization Behavior*, Houghton Mifflin,Boston.
- Dye, Thomas R., 1995 *Understanding Public Policy*, Prentice Hall.
- Dwidjowijoto, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang: Model-model Perumusan, Implemntasi, dan Evaluasi*.: PT. Gramedia Elex Media Komputindo – Kelompok Gramedia.Jakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*., Congressional Quarterly Press,Washington, DC.
- Fredericson, H.George,III,1988, *Administrasi Negara Baru*., LP3S, Jakarta
- GeopolousddanTinambun, 1995, *EfektivitasOrganisasi*, Erlangga ,Jakarta.
- e, Merilee S. dan John W. Thomas. 1991. *Public Choices and PolicyChange: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. TheJohn Hopkins University Press. London.



- Goggin, Malcolm; Ann Bowman; James Lester dan Lawrence O'Toole. 1990. *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Scott, Foresman: Illinois
- Gortner, Harold F. 1984. *Administration in The Public Sector*. , Jhon Willy, New York.
- Hidayat, 1986, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Howlett, Michael and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. : Oxford University Press. Oxford.
- Handayani, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. : Gunung Agung. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan 2007, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Keempat belas, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, PT. Rajagrafindo Persada. Terjemahan Didik Septiyanto, Jakarta :
- James P. Lester dan Joseph Stewart (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Second Edition. Australia: Wadsworth.
- Keban T. Yermias, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media Yogyakarta.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Mayer, T. Richard, 2014, *Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik*, Kreasi Wacana, Bantul Yogyakarta.
- Mazmanian, Daniel H dan Paul A. Sabatier . 1983. *Implementation and Public Policy*, Harper collins New York.
- Miles, Matthew. B and Micheal Hiberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Sage Publication Inc, Inggris.

pho, D, Riant. 2008. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

pho, Riant, 2009, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta.



- Osborne, David dan Ted Geabler, 1993, *Reinventing Geverment, How TheEnterpreuarial, is Tranforming The Public Sector*, A plumeBook, USA.
- Steer, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. : Erlangga.Jakarta.
- Stephen Robbins, Barnwell, 2002, *OrganisationTheory :Conseps and Cases*, Pearson Academic, USA
- Sudiby, A.L 2014, *IdentifikasiPotensiKorupsi pada KeuanganDesa*, Makalahdisampaikanke KPK.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabet,Bandung.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.:Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara: DalamTeoridanPraktek*.: BPFY.Yogyakarta.
- Sulistiyani, AAB, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Grahallmu,Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI)*.: PT Bumi Aksara.Jakarta.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Thoha,Miftah, 2015, *IlmuAdministrasiPublikKontemporer*, Pranadamedia Group, Yogyakarta.
- Van Meter, Donald, & Van Horn, Carle, 1975,*The Policy Implementattion Process : A ConseptualFramworkin : Administration and Society*. Vol 6 no.4 p 445-446.
- ab, Solichin Abdul, 2016. *Analisa KebijaksanaanNegara : Dari FormulasikePenyusunan Model-model Implemantasi*, BumiAksara, Jakarta.



WarsitoUtomo, 2009, *AdministrasiPublikBaru*, PustakaBelajar, Yogyakarta.

Winarno, Budi. (2008). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta:

Winardi. 1992. *Motivasi, Pemotivasian dalam Manajemen Ed.1.* : Rajawali Press.Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

-----, Buku : Pintar Dana Desa, 2016. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

-----, Buku : Peraturan Lengkap “DESA” 2017. Sinar Grafika, Jakarta

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kemendagri, 2015

Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari APBN

-----, 2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa, Visi Media, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari APBN.



Permenkeu No. 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.

Permendes PDTT 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Permendes PDTT 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Permendes PDTT 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data

Permendes PDTT 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat

Permendes PDTT 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendesa No 21 Tahun 2015

Permendes PDTT 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Permendes PDTT 21 Tahun 2015 tentang Prioritas DD Tahun 2016

Permendes PDTT 5 Tahun 2015 tentang Prioritas DD tahun 2015

Permendes PDTT No 19 tahun 2017 Tujuan dan Prioritas Pembangunan Dana Desa

Peraturan Bupati Enrekang No. 196 tahun 2016 Pelaksanaan Dana Desa

#### **INTERNET :**

Apung Widadi, <http://www.rmol.co.read/2015/05/03//Fitra->, Permasalahan Dana Desa, diunduh tanggal 3 Maret 2016

Hendra T. Mahardika, Fisip Unair pada <https://www.academia.edu>, diunduh tanggal 5 Maret 2016.

Web : <http://www.kemendagri.co.id>

Web : <http://www.depkeu.co.id>



Situs Web : <http://www.kemenegpdtt.co.id>

Situs Web : <http://www.bappenas.co.id>





**INSTRUMEN PENELITIAN  
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
KABUPATEN ENREKANG**

**A. Identitas Desa**

- A.1. Nama Desa :  
A.2. Kecamatan :  
A.3. Kategori Desa :

| No | Nama Dokumen          | Data yang Dibutuhkan  | Keterangan       | Check List |
|----|-----------------------|---|------------------|------------|
| 1  | RPJM Desa             | Semua   | Minta<br>File/FC |            |
|    | Kalau tidak diberikan | Minta ditunjukkan bagian indikator kinerja dari RPJM Desa (tabel 1)<br>Minta ditunjukkan program yang mendukung pencapaian tujuan dana desa (tabel 2)                     | Foto             |            |
| 2  | RKP Desa              | Semua   | Minta<br>File/FC |            |
|    | Kalau tidak diberikan | Minta ditunjukkan bagian indikator kinerja dari RKP Desa (tabel 1)<br>Minta ditunjukkan program yang mendukung pencapaian tujuan dana desa (tabel 2)                      | Foto             |            |
| 3  | APB Desa              | Semua   | Minta<br>File/FC |            |
|    | Kalau tidak diberikan | Minta ditunjukkan bagian indikator kinerja dari APB Desa (tabel 1)<br>Minta ditunjukkan program yang mendukung pencapaian tujuan dana desa (tabel 2)<br>Minta ditunjukkan | Foto             |            |





|    |   |   |                                 |
|----|---|---|---------------------------------|
|    |   | program dana desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa (tabel 3)             |                                 |
| 4  | Daftar Hadir Musrembang Desa                    | Jumlah masyarakat yang hadir  | Foto                            |
|    |   | Keterwakilan pekerjaan / gender / suku / agama  | Foto                            |
| 5  | Notulensi Musrembang Desa                       | Keaktifan Masyarakat memberi Saran  | Foto                            |
|    |   | Muatan saran-saran masyarakat untuk disesuaikan dengan APB Desa                           | Foto (sampling beberapa lembar) |
| 6  | Rekening Kas Desa                               | Apakah penerimaan dan pengeluaran desa tergambar dalam rekening desa                      | Foto                            |
| 7  | Rencana Anggaran Biaya Kegiatan                 | Apakah setiap kegiatan dibuatkan RAB?   | Foto beberapa RAB Kegiatan      |
| 8  | Surat Permintaan Pembayaran                     | Apakah pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa | Foto beberapa SPP               |
|    |   | Lampiran pertanggungjawaban kegiatan beserta lampiran bukti transaksi                     | Foto lampiran SPP               |
| 9  | Laporan Realisasi APB Desa 2017 semester I      | Semua   | Minta File / FC                 |
| 10 | Laporan Realisasi APB Desa 2017 semester II     | Semua   | Minta File / FC                 |
| 11 | Buku Kas Umum                                   | Apakah buku kas umum selalu terupdate?  | Foto sample beberapa halaman    |
| 12 | Buku Kas pembantu Pajak                         | Apakah buku tersedia dan digunakan  | Foto sample beberapa halaman    |
|    | Buku Bank                                       | Apakah buku tersedia  | Foto Identitas buku bank        |
|    | Pertanggungjawaban Bendahara kepada Kepala Desa | Apakah ada dokumen PJ Bendahara setiap bulan  | Foto sample beberapa halaman    |



|    |  |   |                                  |
|----|--|---|----------------------------------|
| 15 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 | Semua   | Minta file / FC                  |
|    | Kalau tidak diberikan  | Periksa kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi anggaran (Tabel 4) | Foto                             |
|    |  | Kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi fisik (Tabel 5)            | Foto                             |
| 16 | Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2017              | Apakah tersedia?  | Foto sampel beberapa halaman     |
| 17 | Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa          | Apakah tersedia?  | Foto sampul dan beberapa halaman |
| 18 | Dokumentasi Pertanggungjawaban Kepala Desa                                   | Foto kegiatan PJ atau media PJ (baligho, dll)                             | Minta file atau foto ulang       |

Tabel 1. Indikator Kinerja

| No | Nama Dokumen                             | Ketersediaan               | Ketersediaan Indikator Kinerja (%) | Keterangan |
|----|--|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1  | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | Tersedia / Tidak Tersedia* |                                    |            |
| 2  | Rencana Kerja Pemerintah Desa            | Tersedia / Tidak Tersedia* |                                    |            |
| 3  | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa     | Tersedia / Tidak Tersedia* |                                    |            |

Tabel 2. Program yang sesuai dengan dana desa

| Tujuan Dana Desa  | Indikasi Program |
|---|------------------|
| Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama |                  |
| Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan   |                  |



---

efektif, terbuka, serta bertanggung jawab

- 3 Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- 4 Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- 5 Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- 6 Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

---

Tabel 3.

| Program Prioritas berdasarkan Peraturan Menteri | Kegiatan yang diprogramkan | Interpretasi          | Keterangan |
|---|----------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Bidang Pembangunan</b>                       |                            | Sesuai / Tidak sesuai |            |
| <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>           |                            | Sesuai / Tidak sesuai |            |



Tabel 4. Kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi anggaran (studi dokumen: APBDes dan laporan realisasi APBDes) [Perangkat Desa]

| Uraian  | Besaran Anggaran yang Direncanakan (X) | Realisasi Anggaran (Y) | Persentase Efektivitas (X/Y*100%) |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Penerimaan</b>   |  |                        |                                   |
| <b>PAD</b>  |  |                        |                                   |
| <b>Dana Desa</b>  |  |                        |                                   |
| <b>Bagian dari hasil pajak &amp; retribusi daerah kabupaten/ kota</b> |  |                        |                                   |
| <b>Alokasi Dana Desa</b>  |  |                        |                                   |
| <b>Lain-lain</b>  |  |                        |                                   |
| <b>Belanja</b>  |  |                        |                                   |
| <b>Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                   |  |                        |                                   |
| <b>Pembangunan Desa</b>   |  |                        |                                   |
| <b>Perdayaan Masyarakat</b>   |  |                        |                                   |





**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA  
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESAKABUPATEN ENREKANG**

**A. Identitas Desa**

- A.1. Nama Desa :  
A.2. Kecamatan :

**B. PENGELOLAAN DANA DESA**

**B.1. Perencanaan**

B.1.1. Apakah dokumen-dokumen berikut telah dimiliki oleh pemerintah desa dan apakah setiap dokumen memiliki indikator kinerja/keberhasilan yang dapat diukur?

| No | Nama Dokumen                             | Ketersediaan               | Ketersediaan Indikator Kinerja (%) | Keterangan |
|----|--|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1  | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | Tersedia / Tidak Tersedia* |                                    |            |
| 2  | Rencana Kerja Pemerintah Desa            | Tersedia / Tidak Tersedia* |                                    |            |
| 3  | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa     | Tersedia / Tidak Tersedia* |                                    |            |

B.1.2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa

a. Berapa Jumlah peserta musyawarah pembahasan APBDesa tahun 2015, 2016 dan 2017?

| Tahun | Jumlah yang Hadir |
|-------|-------------------|
| 2015  |                   |
| 2016  |                   |
| 2017  |                   |

b. Bagaimana keterwakilan masyarakat yang hadir dalam musyawarah pembahasan APBDesa berdasarkan latar belakang pekerjaan, gender, suku, agama, dll.?



c. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah? Apakah masyarakat secara aktif ikut memberikan saran dalam musyawarah?

d. Apakah saran-saran warga terakomodasi dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa?

e. Indikasi perencanaan program yang mendukung tercapainya tujuan pemberian dana desa

| No | Tujuan Dana Desa  | Indikasi Program |
|----|---|------------------|
| 1  | Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama |                  |

apa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa:



- 
- 2 Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa:

- 3 Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa:

- 4 Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa:

- 5 Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa:





**6 Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan**

Mengapa program tersebut dianggap mampu mencapai tujuan dana desa:

**B.1.3. Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

a. Apakah dalam penyusunan APBDes, Pemerintah desa memperhatikan Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa?

**YA / TIDAK**

b. Berdasarkan peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa, menurut Bapak/Ibu, Desa Bapak/Ibu termasuk pada tipologi desa apa?

a. Tertinggal/Sangat Tertinggal

b. Berkembang

c. Maju/Mandiri

c. Kesesuaian antara arahan prioritas berdasarkan peraturan menteri dengan kegiatan yang diprogramkan oleh desa

| Arahan Prioritas Penggunaan Dana Desa | Kegiatan yang diprogramkan | Interpretasi | Keterangan |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|

Bidang Pembangunan

Sesuai / Tidak sesuai



---

**Jika ditemukan ketidaksesuaian, mohon dijelaskan alasannya**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai / Tidak  
sesuai

**Jika ditemukan ketidaksesuaian, mohon dijelaskan alasannya**

---

## **B.2. Pelaksanaan**

B.2.1. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa?

**Ya / Tidak**

B.2.2. Bagaimana proses pencairan dana desa/alokasi dana desa?

**a. Sangat Sulit      b. Sulit      c. Mudah      d. Sangat Mudah**

Jika dianggap sangat sulit/sulit, mohon deksripsikan lebih lanjut apa yang dianggap sulit:



### B.2.3. Pelaksanaan Kegiatan

| No | Pertanyaan   | Jawaban         | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    |  | <b>Ya Tidak</b> |            |
| 1  | Apakah pelaksana kegiatan selalu mengajukan Rencana Anggaran Biaya sebelum melaksanakan kegiatan?                                      |                 |            |
| 2  | Apakah Rencana Anggaran Biaya selalu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa                                   |                 |            |
| 3  | Apakah pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa  |                 |            |
| 4  | Apakah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan pernyataan tanggung jawab dan belanja dan lampiran bukti transaksi? |                 |            |

### B.2.4. Perubahan Peraturan

| No | Pertanyaan  | Jawaban         |
|----|---|-----------------|
|    |   | <b>Ya Tidak</b> |
| 1  | Apakah terjadi perubahan APBDesa pada tahun 2017  |                 |
| 2  | <p>Apa alasan dilakukan perubahan?</p> <p>a keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja</p> <p>b keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan</p> <p>c terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan</p> <p>d terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan</p> <p>e perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah</p> |                 |

### B.2.5. Kesesuaian antara tujuan umum dana desa dengan realisasi dana desa

| Tujuan Dana Desa  | Tercapai/Tidak | Keterangan                       |
|---|----------------|----------------------------------|
| mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama |                | membentuk Pemerintahan Desa yang |



|   |   |
|---|---|
|   | profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab  |
| 3 | meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum   |
| 4 | meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional |
| 5 | memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional   |
| 6 | memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan   |

### B.3. Penatausahaan

#### B.3.1. Pembukuan Keuangan

| No | Nama Dokumen            | Ketersediaan               |
|----|-------------------------|----------------------------|
| 1  | Buku kas umum           | Tersedia / Tidak Tersedia* |
| 2  | Buku kas pembantu pajak | Tersedia / Tidak Tersedia* |
| 3  | Buku bank               | Tersedia / Tidak Tersedia* |

B.3.2. Apakah pertanggungjawaban bendahara kepada kepala desa rutin dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan?

**Ya / Tidak**

a. Jika tidak, jelaskan mengapa tidak dilakukan secara rutin?

### B.4. Pelaporan

| No | Nama Dokumen                 | Ketersediaan               | Kesesuaian dengan Format | Waktu Pelaporan | Persentase Serapan Anggaran |
|----|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1  | Laporan Semester Pertama     | Tersedia / Tidak Tersedia* | Sesuai / Tidak Sesuai*   |                 |                             |
|    | Laporan Semester Akhir Tahun | Tersedia / Tidak Tersedia* | Sesuai / Tidak Sesuai*   |                 |                             |



## B.5 Pertanggungjawaban

### B.5.1. Ketersediaan Dokumen

| No | Nama Dokumen   | Ketersediaan               | Kesesuaian dengan Format |
|----|--|----------------------------|--------------------------|
| 1  | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 | Tersedia / Tidak Tersedia* | Sesuai / Tidak Sesuai*   |
| 2  | Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2016              | Tersedia / Tidak Tersedia* | Sesuai / Tidak Sesuai*   |
| 3  | Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa          | Tersedia / Tidak Tersedia* | Sesuai / Tidak Sesuai*   |

### B.5.2. Kemana saja laporan pertanggungjawaban disampaikan?

B.5.3. Apakah Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

**Ya / Tidak**

B.5.4. Melalui media apa saja pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat?

B.5.5. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang pertanggungjawaban yang disampaikan?



## **C. FAKTOR YANG MEMENGARUHI**

### **C.1. Sumber Daya Manusia**

C.1.1. Siapa yang mengerjakan laporan keuangan di Desa?

C.1.2. Siapa-siapa saja perangkat desa yang pernah mengikuti pelatihan/bimtek keuangan desa?

C.1.3. Bagaimana pemahaman perangkat desa terhadap perturan-peraturan mengenai keuangan desa?

### **C.2. Manajemen**

C.2.1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa?



C.2.2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa oleh BPD?

C.2.3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Daerah?

C.2.4. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Pusat?

C.2.5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa oleh Masyarakat?

C.2.6. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa?



### C.3. Sosial Politik

C.3.1. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa?

C.3.2. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah desa?

C.3.3. Apakah masyarakat bersikap kritis terhadap informasi keuangan desa?

C.3.4. Bagaimana hubungan kekerabatan kepala desa dengan masyarakat?





## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESAKABUPATEN ENREKANG

Nama Responden :

Pekerjaan :

### A. Identitas Desa

A.1. Nama Desa :

A.2. Kecamatan :

### B. PENGELOLAAN DANA DESA

#### B.1. Perencanaan

B.1.1. Pengetahuan Masyarakat ttg Dokumen Perencanaan di Desa

| No | Nama Dokumen                             | Pengetahuan     | Pernah Melihat        | Keterlibatan dalam Penyusunan |
|----|--|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1  | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | Tau / Tidak Tau | Pernah / Tidak Pernah | Terlibat / Tidak Terlibat     |
| 2  | Rencana Kerja Pemerintah Desa            | Tau / Tidak Tau | Pernah / Tidak Pernah | Terlibat / Tidak Terlibat     |
| 3  | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa     | Tau / Tidak Tau | Pernah / Tidak Pernah | Terlibat / Tidak Terlibat     |

B.1.2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa

a. Sepengetahuan Bapak, berapa jumlah peserta musyawarah pembahasan APBDesa tahun 2015, 2016 dan 2017?

Tahun Jumlah yang

Hadir

2015

2016

2017



- b. Bagaimana keterwakilan masyarakat yang hadir dalam musyawarah pembahasan APBDesa berdasarkan latar belakang pekerjaan, gender, suku, agama, dll.?

- c. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah? Apakah masyarakat secara aktif ikut memberikan saran dalam musyawarah?

- d. Apakah saran-saran bapak terakomodasi dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa?

**B.1.3. Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Apakah dalam penyusunan APBDes, Pemerintah desa memperhatikan peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa?

**YA / TIDAK / TIDAK TAU**

Berdasarkan peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa, menurut Bapak/Ibu, Desa Bapak/Ibu termasuk pada tipologi desa apa?



- a. Tertinggal/Sangat Tertinggal
- b. Berkembang
- c. Maju/Mandiri

c. Kesesuaian antara arahan prioritas berdasarkan peraturan menteri dengan kegiatan yang diprogramkan oleh desa

| Arahan Prioritas Penggunaan Dana Desa | Kegiatan yang diprogramkan | Keterangan |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| Bidang Pembangunan                    |                            |            |
|                                       |                            |            |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat        |                            |            |
|                                       |                            |            |

## B.2. Pelaksanaan

### B.2.1. Perubahan APBDesa

| No | Pertanyaan  | Jawaban  |
|----|---|----------|
|    |   | Ya Tidak |
| 1  | Apakah terjadi perubahan APBDesa pada tahun 2017                        |          |
| 2  | Apakah bapak dilibatkan dalam pembahansan perubahan APBDesa tahun 2016? |          |
| 3  | Mengapa terjadi perubahan APBDesa tahun 2017?                           |          |



### B.2.2. Kesesuaian antara tujuan umum dana desa dengan realisasi dana desa

| No | Tujuan Dana Desa  | Ya/Tidak | Keterangan |
|----|---|----------|------------|
| 1  | Apakah setelah ada dana desa, partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi dan aset desa menjadi lebih baik? |          |            |
| 2  | Apakah setelah ada dana desa, pemerintah desa lebih profesional, terbuka dan bertanggung jawab? 3                 |          |            |
|    | Apakah setelah ada dana desa, pelayanan kepada masyarakat desa semakin baik?                                      |          |            |
| 4  | Apakah setelah ada dana desa, persatuan masyarakat lebih baik?  |          |            |
| 5  | Apakah setelah ada dana desa, perekonomian masyarakat lebih maju?   |          |            |
| 6  | Apakah setelah ada dana desa, masyarakat semakin merasa ikut menjadi bagian dari pembangunan desa?                |          |            |

### B.3. Pelaporan

| No | Nama Dokumen                 | Pengetahuan      | Penilaian            | Keteragngan |
|----|------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 1  | Laporan Semester Pertama     | Tau/Tidak<br>Tau | Baik / Tidak<br>Baik |             |
| 2  | Laporan Semester Akhir Tahun | Tau/Tidak<br>Tau | Baik / Tidak<br>Baik |             |

### B.5 Pertanggungjawaban

B.5.1. Apakah bapak pernah mendapatkan informasi mengenai Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa?

**Ya / Tidak**

B.5.2. Melalui media apa saja pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat?

B.5.3. Bagaimana tanggapan bapak tentang pertanggungjawaban yang disampaikan?



## **C. FAKTOR YANG MEMENGARUHI**

### **C.1. Sumber Daya Manusia**

C.1.1. Siapa yang mengerjakan laporan keuangan di Desa?

### **C.2. Manajemen**

C.2.1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa oleh Masyarakat?

C.2.2. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa?

### **C.3. Sosial Politik**

C.3.1. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa?

C.3.2. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah desa?



C.3.3. Apakah masyarakat bersikap kritis terhadap informasi keuangan desa?

C.3.4. Bagaimana hubungan kekerabatan kepala desa dengan masyarakat?



**LAMPIRAN :**

1. Foto Wawancara dengan Informan dan Contoh Kegiatan/Paket Program Dana Desa
2. Instrumen Penelitian
3. Peta Kabupaten Enrekang
4. Road Map Dana Desa 2015-2017
5. Rincian Dana Desa 2015-2017
6. Surat Izin Penelitian



LAMPIRAN :

1. Foto Wawancara dengan Informan dan Contoh Kegiatan/Paket Program Dana Desa







Wawancara dengan Nana Sutrisna, SE  
KepemdesBapemdesKab.Enrekangtentangpengelolaan dana desa, Nopember  
2017.





Wawancara dengan Yusuf Nohong, Camat Cendana, Nopember 2017



Wawancara dengan Amiruddin Kades Pundi Lemo Kec. Cendana, Nopember 2017



Wawancara dengan Sukri, ST, Koordinator Tenaga Pendamping Desa Kab. Enrekang, Nopember 2017





Kantor Desa Pundi Lemo Kecamatan Cendana dan Papan Informasi desa tentang Program Dana Desa, Nopember 2017



Kegiatan Pembangunan Jalan Beton 100% (3x 500 M) di Dusun Padukku Desa Pundi Lemo Kec. Cendana yang menggunakan Dana Desa, Nopember 2017



Kegiatan Pembangunan Kolam Ikan 80% (50x 75 M) di Desa Ranga Kec. Enrekang yang menggunakan Dana Desa, Nopember 2017





Kegiatan Pembangunan Poyandu 80% ( 5x10 M) di DesaMataaloKec.Alla yang menggunakan Dana Desa , Nopember 2017



Wawancara dan konsultasidenganA.Oddang SH, Kasie  
DatunKajariEnrekangtentangPenyalahgunaan Dana DesaKasusDesaBolang,  
Juni 2018





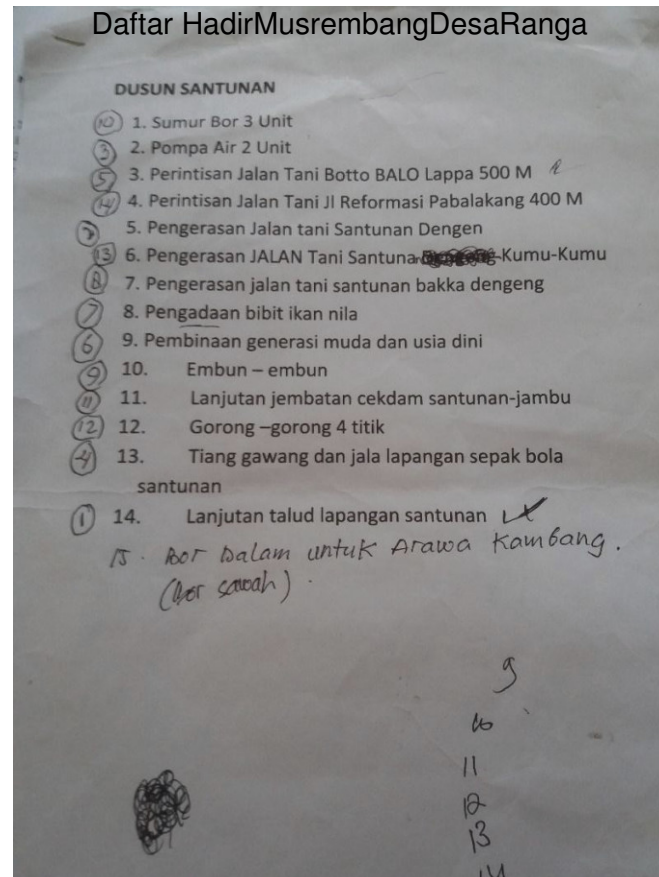


SuasanaMusrembangDesaRanga,  
 Sumber: Data sekunderdaripemerintahDesaRanga

DAFTAR HADIR MUSREMBANG TINGKAT DESA

| No | Nama              | Alamat        | No | Alamat |
|----|-------------------|---------------|----|--------|
| 1  | ALFI SULTAN       | Ko. Gungah    | 1  |        |
| 2  | MUSA              | Teluk Kemang  | 2  |        |
| 3  | SAMUDRA S         | KEMANG-24     | 3  |        |
| 4  | H. ANAN D         | Ko. Kemang    | 4  |        |
| 5  | MALANGSIH         | Dist. Kemang  | 5  |        |
| 6  | MARIN             | ledeh         | 6  |        |
| 7  | SAL. REDI         | ASAP, BANGUN  | 7  |        |
| 8  | BUSHA ARIAN       | ASAP, GAG     | 8  |        |
| 9  | DWI JULIAE        | Ekand         | 9  |        |
| 10 | Ac. Ad.           | Ekand         | 10 |        |
| 11 | JATUMANG.         | Ekand         | 11 |        |
| 12 | HASEIN            | perah bola    | 12 |        |
| 13 | MUEDINT           | BANUA         | 13 |        |
| 14 | S.U.L.C.          | BANUA         | 14 |        |
| 15 | ABRIAN            | BANUA         | 15 |        |
| 16 | TATULIN           | Lembong       | 16 |        |
| 17 | BA. ZAIN          | BANGUN BUKI   | 17 |        |
| 18 | BA. MAJ           | Lembong       | 18 |        |
| 19 | ZAINUDDIN         | Lembong       | 19 |        |
| 20 | ZUHALIF           | Lembong       | 20 |        |
| 21 | LIM               | DATTEBELA     | 21 |        |
| 22 | BERDUNHATI K. MAM | BRANGA        | 22 |        |
| 23 | NUTI C            | Perahy Perahy | 23 |        |
| 24 | ZULHANA           | BANUA         | 24 |        |
| 25 | HUTI              | BANUA         | 25 |        |
| 26 | BACO              | BANUA         | 26 |        |
| 27 | IRAMPE            | SUPPU         | 27 |        |
| 28 | MARUDAN           | SUPPU         | 28 |        |
| 29 | RAMAN             | SUPPU         | 29 |        |
| 30 | MARON             | SUPPU         | 30 |        |
| 31 | LAHADI            | DAGO DOR      | 31 |        |
| 32 | SUMADIN           | BANUA         | 32 |        |
| 33 | SUPRIAN S         | Datoh Lemang  | 33 |        |
| 34 | TALJUDAN          | Datoh Lemang  | 34 |        |
| 35 | SIPING            | Lembong       | 35 |        |
| 36 | ACO               | SUPPU         | 36 |        |
| 37 | WERYU             | SUPPU         | 37 |        |
| 38 | MOL HASEI         | (outborn)     | 38 |        |
| 39 | MALINDA VINA      | Emband        | 39 |        |
| 40 |                   | Emband        | 40 |        |
| 41 |                   | Emband        | 41 |        |
| 42 |                   | Emband        | 42 |        |
| 43 |                   | Emband        | 43 |        |
| 44 |                   | Emband        | 44 |        |

Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



Daftar Usulan Masyarakat dari Hasil Musyawarah Desa Ranga





SusunanStrukturOrganisasiPerangkatDesaRanga



SusunanStruktur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) DesaRanga





## Standar dan Besaran Penghasilan dan Tunjangan Aparat Desa

| Nama Jabatan       | Tahun 2015 (Rp)                | Tahun 2016 (Rp)                | Tahun 2017 (Rp)                | Keterangan        |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Kades              | 1.300.000.- s/d<br>1.500.000.- | 1.800.000.- s/d<br>2.000.000.- | 1.800.000.- s/d<br>2.000.000.- | Penghasilan tetap |
| Sekdes             | 1.000.000.- s/d<br>1.300.000.- | 1.300.000.- s/d<br>1.500.000.- | 1.300.000.- s/d<br>1.500.000.- | Penghasilan tetap |
| Kaur               | 600.000.- s/d<br>800.000.-     | 900.000.- s/d<br>1.000.000.-   | 900.000.- s/d<br>1.000.000.-   | Penghasilan tetap |
| Kasi               | 600.000.- s/d<br>800.000.-     | 600.000.-<br>800.000.-         | 800.000.-<br>1.000.000.-       | Penghasilan tetap |
| Kepala dusun       | 600.000.- s/d<br>800.000.-     | 600.000.-<br>800.000.-         | 800.000.-<br>1.000.000.-       | Penghasilan tetap |
|                    | 600.000.- s/d<br>800.000.-     | 600.000.-<br>800.000.-         | 800.000.-<br>1.000.000.-       | Penghasilan tetap |
| Kades              | 500.000.-                      | 1.500.000.-                    | 1.700.000.-                    | Tunjangan Jabatan |
| Sekdes             | 350.000.-                      | 500.000.-                      | 800.000.-                      | Tunjangan Jabatan |
| Kaur               | 300.000.-                      | 400.000.-                      | 500.000.-                      | Tunjangan Jabatan |
| Kasi               | 300.000.-                      | 400.000.-                      | 500.000.-                      | Tunjangan Jabatan |
| Kepala dusun       | 250.000.-                      | 400.000.-                      | 500.000.-                      | Tunjangan Jabatan |
| Bendahara Kegiatan | 450.000.-                      | 450.000.-                      | 450.000.-                      | Tunjangan Jabatan |
|                    |                                |                                |                                |                   |
| Ketua BPD          | 250.000.-                      | 400.000.-                      | 750.000.-                      | Tunjangan Jabatan |
| Wakil Ketua        | 200.000.-                      | 300.000.-                      | 600.000.-                      | Tunjangan Jabatan |
| Sekretaris         | 180.000.-                      | 250.000.-                      | 500.000.-                      | Tunjangan Jabatan |
| Anggota            | 150.000.-                      | 200.000.-                      | 400.000.-                      | Tunjangan Jabatan |

Sumber : Pemdes Kabupaten Enrekang, 2018





LAMPIRAN :

2. Instrumen Penelitian

